

SKRIPSI

PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT-NTB DALAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus Desa Labuhan Lombok)

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI)
Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

MURNI APRILIANA
NIM. 218110040

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021-2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYRAKAT-NTB DALAM PENYALURAN
BANTUAN PANGAN NON-TUNAI
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus Desa Labuhan Lombok)**

Oleh :

MURNI APRILIANA

Untuk memenuhi ujian Skripsi

Pada Tanggal 8 Februari 2022

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Mustamin H. Idris, MS
NIDN.0031126484


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN.0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYRAKAT-NTB DALAM PENYALURAN
BANTUAN PANGAN NON-TUNAI
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus Desa Labuhan Lombok)**

Oleh ;

MURNI APRILIANA
218110040

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 8 februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S.
NIDN.0031126484

(PU) (.....)

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

(PP) (.....)

Drs. Mintasrihardi, M.H.
NIDN.0830016101

(PN) (.....)

Mengetahui.,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : Murni Apriliana

NIM : 218110040

Alamat : Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur

Memang benar skripsi yang berjudul Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat-NTB Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Desa Labuhan Lombok) adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 8 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Murni Apriliana
NIM.218110040



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Apriliana
NIM : 218110040
Tempat/Tgl Lahir : Labuhan Lombok, 17 April 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 085 932 249 749
Email : murniapriliانا@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat - MTB
Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Kabupaten Lombok Timur
(studi kasus Labuhan Lombok.)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23 Februari2022

Penulis



MURNI APRILIANA
NIM. 218110040

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Apriliana
NIM : 210110040
Tempat/Tgl Lahir : Labuhan Lombok , 17 April 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085932 240749 / murniapriliana@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat -PTTB
Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Kabupaten Lombok Timur
(studi Kasus Desa Labuhan Lombok)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 23 februari2022
Penulis



MURNI APRILIANA
NIM. 210110040

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan ku perkenankan bagimu"

(QS. AL-Mu'min ayat 60)

"hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya"

(Najwa Shihab)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat-NTB Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Desa Labuhan Lombok)” sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Proposal skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik moril maupun materil. Maka dengan ketulusan hati saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. H. Arsyad Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Drs. H. Mustamin H. Idris selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil bagi penulis.

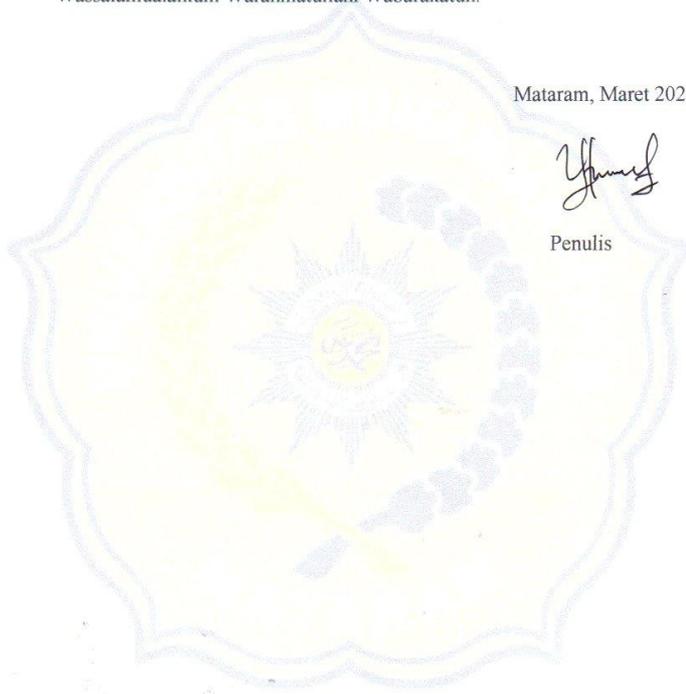
Mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Maret 2022



Penulis



**PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT-NTB DALAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN
NON-TUNAI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus Desa Labuhan Lombok)**

Murni Apriliana¹, Mustamin H. Idris², Ayatullah Hadi³
Mahasiswa, Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan Program Bantuan Pangan Non-Tunai, namun faktanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Maka untuk mengurangi penyimpangan dibutuhkan pengawasan oleh semua kalangan salah satunya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat-NTB (LPKSM-NTB). Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengawasan LPKSM-NTB sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam mengawasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Kabupaten Lombok Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif, data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Angket dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan LPKSM-NTB dilakukan dengan cara pengawasan represif yaitu dengan melakukan inspeksi dan pengawasan pasca kegiatan diantaranya yaitu pemeriksaan terhadap e-Warong, mengawasi harga komoditi, kualitas komoditi dan jumlahkomoditi, memeriksa KPM memegang dan mengetahui PIN KKS serta melaporkan pihak yang melakukan penyimpangan. LPKSM-NTB juga telah menindaklanjuti temuan terkait pelanggaran penyaluran BPNT di Lombok Timur. Pelaksanaan BPNT di Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan bahwa pengawasan LPKSM-NTB terkait enam aspek pelaksanaan BPNT telah berjalan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat responden (KPM) bahwa terdapat 70% yang menilai telah efektif dan sangat efektif.

Kata Kunci: Pengawasan, LPKSM-NTB, Bantuan Pangan Non-Tunai

**SUPERVISION OF INDEPENDENT COMMUNITY CONSUMER
PROTECTION INSTITUTIONS ON THE FOOD AID NON-CASH
DISTRIBUTION
IN EAST LOMBOK DISTRICT
(Case Study in Labuhan Lombok Village)**

Murni Apriliana¹, Mustamin H. Idris², Ayatullah Hadi³
Student¹, Principal Advisor², Companion Advisor³
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The government has made several efforts to address the problem of poverty in Indonesia, one of which is issuing the Non-Cash Food Assistance Program, although the program's implementation has been marred by numerous inconsistencies. To reduce deviations, all groups, including the Non-Governmental Consumer Protection Agency-NTB, must be supervised (LPKSM-NTB). The goal of this study is to look into the supervision of LPKSM-NTB, which is one of the institutions that oversee the East Lombok Regency's Non-Cash Food Assistance Program.

The descriptive quantitative approach was employed in this study, and the data used were primary and secondary data, with data collected by observation, interviews, questionnaires, and documentation. The findings revealed that LPKSM-NTB was supervised through repressive means, such as conducting post-activity inspections and supervision, which included inspecting e-Warong, monitoring commodity prices, commodity quality and quantity, checking KPM holding and knowing KKS PIN, and reporting parties who made deviations. The LPKSM-NTB has also investigated allegations of BPNT distribution irregularities in East Lombok. The overall implementation of BPNT in East Lombok Regency demonstrates that LPKSM-NTB supervision of six components of BPNT implementation has been effective. This is in line with the opinion of respondents (KPM), who believe it is effective or extremely effective in 70% of cases.

Keywords: *Supervision, LPKSM-NTB, Non-Cash Food Aid*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengawasan.....	12
C. Kerangka Berpikir.....	22

D. Variabel Penelitian.....	22
E. Definisi Konseptual.....	24
F. Definisi Operasional.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel.....	27
D. Penentuan Responden dan Informan	29
E. Jenis dan Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Analisis Data	35
H. Keabsahan Data.....	36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	38
B. Bentuk Pengawasan LPKSM-NTB dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Lombok Timur	46
C. Tindaklanjut LPKSM-NTB mengenai temuan Ombudsman Perwakilan NTB terkait pelanggaran BPNT di Kabupaten Lombok Timur.....	65
D. Efektivitas 6 Aspek Pelaksanaan BPNT.....	67
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Definisi Operasional.....	25
2. Data Penerima BPNT Desa Labuhan Lombok	28
3. Sampel Penelitian.....	29
4. Informan Penelitian.....	30
5. Responden Penelitian	30
6. Unit Analisis Data Primer	31
7. Unit Analisis Data Sekunder.....	32
8. Skala Likert	33
9. Jumlah Penduduk Desa Labuhan Lombok.....	40
10. Kepadatan Penduduk Desa Labuhan Lombok	41
11. Data Penerima BPNT Desa Labuhan Lombok	42
12. Variabel Tepat Sasaran	66
13. Variabel Tepat Jumlah	68
14. Variabel Tepat Waktu	69
15. Variabel Tepat Harga	70
16. Variabel Tepat Kualitas.....	71
17. Variabel Tepat Administrasi	72
18. Rangkuman Variabel 6 Aspek Penyaluran BPNT Lombok Timur.....	74

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir.....	23
2. Triangulasi Sumber.....	36
3. Triangulasi Teknik.....	37
4. Kantor LPKSM-NTB.....	43
5. Struktur Organisasi LPKSM-NTB.....	45
6. Alur Edukasi dan Sosialisasi.....	49
7. Dana BPNT.....	51
8. Mekanisme Pemanfaatan Program Sembako.....	54
9. Surat dan Hasil Verifikasi.....	55
10. Hasil Temuan LPKSM-NTB.....	57
11. Hasil Temuan LPKSM-NTB.....	60
12. Surat Permohonan Tindaklanjut Hasil Temuan agen E-Warong yang Tidak Sesuai Pedoman Umum.....	62
13. Laporan dan Temuan LPKSM-NTB.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk Negara Indonesia, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Pendapat konvensional mengaitkan Sejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.

Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap kemiskinan karena hal ini merupakan amanah konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dimana negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 “Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

Berdasarkan data BPS Indonesia persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin pada September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin pada Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang pada September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang pada Maret 2020. (<https://www.bps.go.id/pressrelease-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-40-persen.html>)

Berdasarkan data BPS NTB 2021, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23%). Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 713,89 ribu orang (13,97%). Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2020 – September 2020 yaitu sebesar 0,26 %. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 746,04 ribu orang, meningkat sekitar 32,15 ribu orang dibandingkan Maret 2020 yang sebanyak 713,89 ribu orang, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/753/maret-2021---jumlah-pnduduk-miskin-di-ntb-746-66-ribu-orang-htm>).

Sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan data BPS Kabupaten Lombok Timur 2021, mengalami peningkatan yang bertahap dari Tahun 2011 hingga 2020. Peningkatan yang tajam terjadi antara tahun 2011 hingga 2013. Garis kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 278.118 ribu rupiah meningkat hingga 15 persen menjadi 321.249 ribu rupiah. Pada tahun 2013 angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 447.263-⁴ pada

tahun 2020. Dalam kurun waktu 7 tahun, kemiskinan berhasil ditekan hingga 4 persen dari jumlah penduduk walaupun jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya. Penurunan yang signifikan dapat dilihat antara tahun 2010 hingga 2013 (penurunan terjadi hingga 6 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin tahun 2020 adalah sebanyak 15,24 persen. Angka ini menurun dari tahun 2019 16,15 persen.

(<http://lomboktimurkab.bps.go.id/publication/2021/09/27/1d342clcab4704f7b8dbf74/statistik-daerah-kabupaten-lombok-timur-2021.htm>)

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih.

Selanjutnya pada tahun 2018 Program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi Program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, Program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT, dengan sejumlah kabupaten yang memiliki keterbatasan kondisi infrastruktur non tunai menjalankan mekanisme Program Sembako untuk wilayah khusus.

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan

hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT, 2020).

Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Program BPNT ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pada kenyataannya banyak sekali kasus-kasus BPNT yang ditemukan Ombudsman Perwakilan NTB di Lombok Timur. Menurut laporan Ombudsman Perwakilan NTB 2021 menjadikan Lombok Timur sebagai sentrum pengawasan lantaran paling kental praktik pelanggaran mulai dari agen e-Warung yang tidak memenuhi syarat, ulah nakal para pendamping kecamatan yang memaksa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengambil barang pada supplier tertentu serta kuantitas dan kualitas barang yang diberikan kepada KPM tidak sesuai harapan.

Menurut laporan Ombudsman Perwakilan NTB 2021 mengelompokkan temuan tersebut menjadi tiga kategori, “yang pertama yakni penyimpangan prosedur penyaluran BPNT. Model penyalurannya tidak sesuai dengan pedoman umum, temuan berikutnya yaitu tidak kompetennya e-Warung yang ditunjuk pihak bank, tidak sedikit dari e-Warung yang ditemukan justru jualan

pulsa HP dan listrik. Padahal, sesuai amanat pedoman umum penyaluran BPNT, e-Warong harus menjual bahan pangan. Begitu juga dengan kualitas bahan pangan yang disalurkan, banyak penerima manfaat yang komplain dengan barang yang mereka terima, temuan lainnya yaitu banyak oknum pendamping yang melampaui kewenangannya dengan memaksa KPM mengambil barang pada supplier tertentu.

Masalah-Masalah inilah yang sering terjadi dalam pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Lombok Timur. Sangat jauh jika kita mengacu kepada tujuan pelaksanaan program Sembako yang dimana berkaitan dengan 6 aspek (6T) yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Oleh karena itu untuk keberhasilan program ini maka perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat maupun LSM yang ada.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LSM dikenal pula dengan sebutan Organisasi Non-Pemerintahan (Non-Governmental Organization). LSM merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat mandiri. Keberadaan LSM di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi wadah perjuangan aspirasi masyarakat. Sebagai wadah perjuangan tentu saja idealnya keberadaan LSM benar-benar dibutuhkan. salah satu LSM yang ada di Lombok Timur yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat-Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut LPKSM-NTB.

LPKSM-NTB adalah lembaga non-pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM-NTB telah aktif

melakukan pengawasan terkait penyaluran Program BPNT di Lombok Timur. Menurut UU No. 89 Tahun 2019 pasal 44 ayat (3) tentang LPKSM, LPKSM mempunyai tugas menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang atau jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Keberadaan LPKSM sangatlah penting dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah melindungi hak konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana pengawasan LPKSM-NTB dalam penyaluran program BPNT di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan LPKSM-NTB dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Lombok Timur ?
2. Apakah LPKSM-NTB telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Lombok Timur ?
3. Apakah dalam pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM-NTB telah mengarahkan sesuai dengan 6 Aspek pelaksanaan BPNT di Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan LPKSM-NTB dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut temuan pelanggaran dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Lombok Timur.
3. Untuk mengetahui dalam pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM-NTB telah mengarahkan sesuai dengan 6 Aspek pelaksanaan BPNT oleh LPKSM-NTB

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

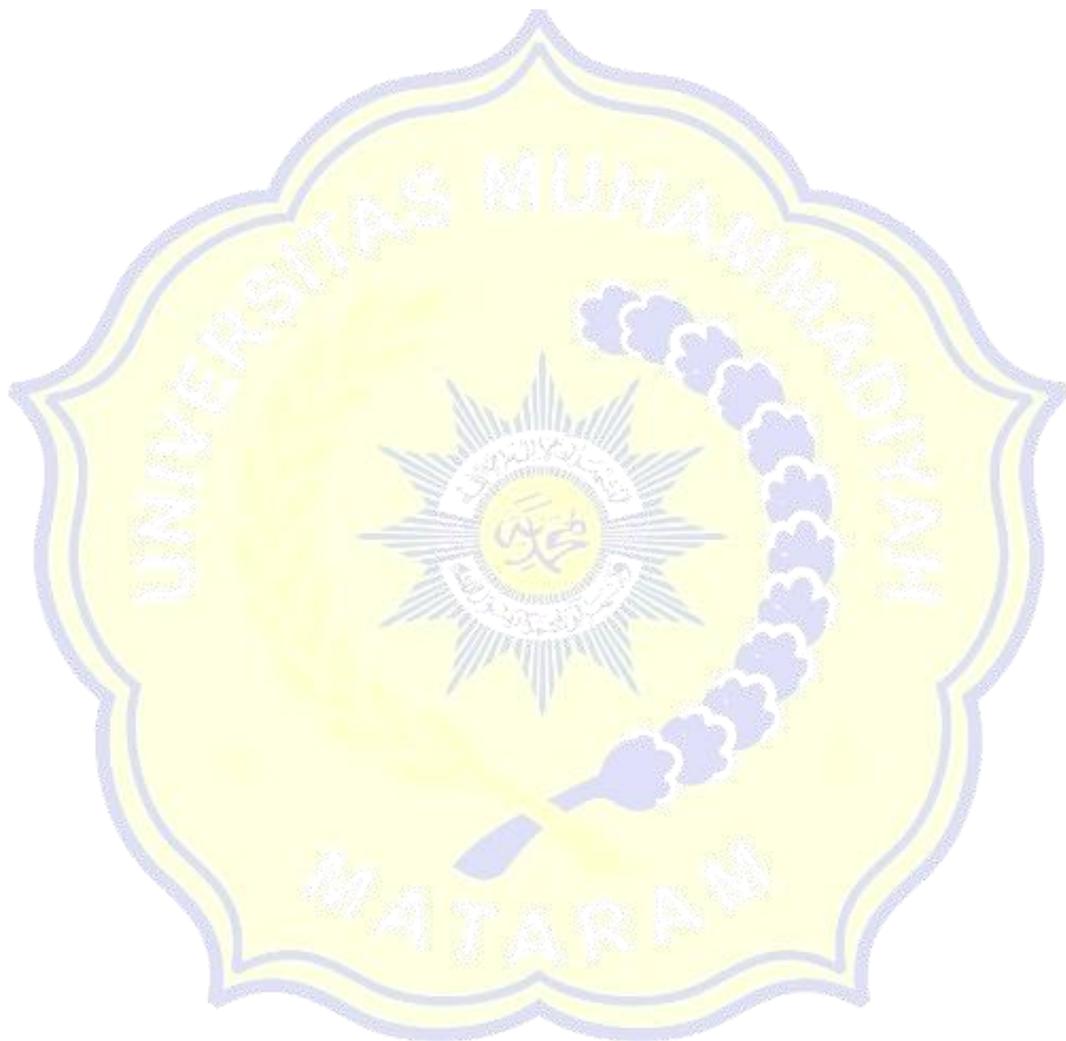
Harapannya agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber data atau sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah pengawasan suatu program.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi maupun lembaga yang menangani langsung mengenai program BPNT
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan data bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki penyaluran Program BPNT.

3. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Melihat dari masalah dan judul penelitian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya sebuah pemaparan tentang penelitian terdahulu guna mengungkapkan fenomena yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi acuan penulis sebagai referensi dalam melakukan penelitian hingga dapat memperkaya teori sebagai bahan kajian yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

1. Nurmahayani dan I ketut Keneng (2016), berjudul “Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk pengawasan dari LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dengan cara penelitian, pengujian, dan/ survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus yang sama yaitu pengawasan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan.
2. Azizah (2018) berjudul “Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di

Pengadilan Agama”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan prinsip utama dalam UU No. 7 Tahun 1989 terkait dengan subyek hukum adalah berlakunya asas personalitas keislaman telah memberikan kewenangan kepada LPKSM untuk mengajukan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Persamaan penelitian Azizah dengan penelitian sekarang yaitu pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Azizah berfokus pada *Legal Standing* LPKSM sedangkan penelitian ini berfokus pada Pengawasan LPKSM.

3. Talumewo (2018) berjudul “Tugas Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tugas lembaga konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan dilaksanakan bersama Pemerintah dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survey. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan undang-undang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan LPKSM. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian

terdahulu menggunakan hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif.

4. Krisna (2019) berjudul “Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bekerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi konsumen. Persamaannya terletak pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada *Legal Standing* sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengawasan.
5. Sedana, dkk. (2021) berjudul “Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran YLPK Bali yakni menerima pengaduan kerugian konsumen serta membantu menyelesaikan sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi. Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen belum efektif

dikarenakan struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya dalam hal sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kata manajemen bukanlah sesuatu yang asing dan sering kita dengar bahkan secara tidak sadar kita telah menerapkan manajemen dalam kehidupan kita baik pribadi, berkelompok serta bermasyarakat. Fungsi-fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi Pelaksanaan (Actuating), dan fungsi pengawasan (Controlling).

Dari fungsi manajemen diatas, yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan (Controlling). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kegiatan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Menurut Winardi (dalam Suadi 2014:15) pengawasan adalah;

Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pengawasan adalah fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti

yang diinginkan. Sedangkan menurut Komaruddin pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Menurut Saiful Anwar (Suadi 2014:16) mendefinisikan pengawasan sebagai pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut Manullang (1995:13) pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk menentukan suatu pekerjaan, menilainya dan kemudian mengoreksi supaya sesuai dengan rencana semula.

Menurut Koonzt, yang dikutip oleh Salindeho (1998:39) dikatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa apa yang dilaksanakan cocok dengan rencana.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh G.R Terry (2008:10) bahwa pengawasan adalah:

menentukan standar, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan tindakan korektif yang diperlukan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan standar (ukuran).

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh LPKSM-NTB untuk menilai

apakah realita penyaluran BPNT di Lombok Timur yang telah sesuai dengan apa yang ditetapkan atau sudah sesuai dengan peraturan serta pedoman pelaksanaan.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Menurut Soekarno dalam Suadi (2014:17) tujuan pengawasan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana;
- 2) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi;
- 3) Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien;
- 4) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan dalam kegiatan;
- 5) Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.

Disisi lain Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama dan timbulnya kesalahan yang baru
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Proses manajemen yang dijalankan organisasi membutuhkan peran optimal dari sumber daya yang dimiliki organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kerja. Pengawasan memiliki sasaran-sasaran yang ditujukan untuk mengatur pelaksanaan kerja tersebut oleh

organisasi. Menurut Siagian (1986:137) menguraikan sasaran pengawasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa melalui pengawasan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana
- 2) Bahwa struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan rencana.
- 3) Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditetapkan oleh bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bahwa dilaksanakan secara rencana, kontinu dan sistematis.
- 4) Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
- 5) Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam pelaksanaan.
- 6) Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes dan dislike.

3. Prinsip Pengawasan

Agar fungsi pengawasan berhasil maka pimpinan suatu organisasi harus mengimplementasikan prinsip-prinsip pengawasan. Menurut Ulbert Silalahi dalam Suadi (2014:19) prinsip-prinsip pengawasan antara lain, yaitu:

- 1) Pengawasan harus berlangsung secara terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan;
- 2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif;
- 3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan;
- 5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna);
- 6) Pengawasan harus fleksibel;
- 7) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Plane and Objective Oriented);
- 8) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau control by exception;

- 9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*Corrective Action*).

4. Jenis Pengawasan

Pengawasan terdiri dari beberapa jenis, jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan fungsi atau tempatnya. Saiful Anwar dalam Suadi (2014:20) menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan menjadi:

1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris/structural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan kode etik dan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan dari segi waktunya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau peraturan tersebut dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan atau peraturan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggukhan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

- 1) Pengawasan dari segi hukum misalnya pengawasan dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitikberatkan pada segi legalitas.
- 2) Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu pengawasan teknis administrative intern dalam lingkungan pemerintah sendiri selain bersifat legalitas juga lebih menitikberatkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

Menurut Suadi (2014:21) Jenis-jenis lain dari pengawasan antara lain:

- 1) Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara berkesinambungan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, pengawasan fungsional biasanya bersifat internal. Aparat pengawas fungsional dalam suatu instansi disebut Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI hanya membantu pimpinan agar dapat melakukan manajemennya, melakukan pengawasan melekat atau pengendaliannya dengan baik. SPI tidak berwenang mengambil tindakan sendiri, harus dikoordinasikan dengan atasannya.
- 3) Pengawasan Legislatif, dikenal juga dengan pengawasan politik, merupakan fungsi yang dimiliki parlemen disamping fungsi legislasi dan budgeting. Pengawasan legislative ditujukan pada pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 1945, hukum dan peraturan pelaksanaannya yang termanifestasikan pada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat.
- 4) Pengawasan Masyarakat, disebut juga kontrol sosial merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat sendiri terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- 5) Pengawasan Yudikatif, merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung untuk mengawasi peraturan di bawah Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang secara formal untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

5. Teknik Pengawasan

Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal yaitu:

- a) Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung
 - 1) Pengawasan Langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di

tempat pekerjaan, dan menerima laporan langsung pula dari pelaksana.

- 2) Pengawasan Tidak Langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.
- b) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif
- 1) Pengawasan Preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - 2) Pengawasan Represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
- c) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern
- 1) Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - 2) Pengawasan Ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

6. Indikator Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan haruslah berlangsung dengan efektif. Hal ini agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses pengawasan dilaporkan dengan segera agar penyimpangan tersebut dapat diatasi dan tujuan yang diharapkan dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Karakteristik pengawasan yang efektif, diantaranya yaitu:

- 1) Akurat, informasi mengenai kegiatan yang dilakukan harus akurat.

Apabila data tidak akurat dari sistem pengawasan maka dapat menyebabkan organisasi menciptakan masalah yang sebenarnya tidak dan juga organisasi mengambil tindakan yang keliru.

- 2) Tepat Waktu, informasi yang diperoleh harus segera dikumpulkan, disampaikan dan juga dievaluasi apabila perbaikan harus dilaksanakan.
- 3) Objektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan juga bersifat objektif serta lengkap.
- 4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan yang dilakukan harus terpusat pada bidang dimana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- 5) Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- 6) Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
- 7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, Hal ini dikarenakan setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
- 8) Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan lingkungan.
- 9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, pengawasan efektif yang dilakukan harus menunjukkan, baik deteksi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

- 10) Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonom, tanggung jawab dan berprestasi.

7. Proses Pengawasan

Menurut G.R Terry (2008:12) proses pengawasan ada 4 yaitu:

- 1) Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan
- 2) Mengukur pelaksanaan
- 3) Membandingkan pelaksanaan dengan standar
- 4) Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara atau tindakan yang tepat.

Sedangkan menurut Sutisna (1993:240), dilihat sebagai proses tindakan pengawasan terdiri dari empat langkah yaitu:

- 1) Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran atau penilaian
- 2) Mengukur atau menilai perbuatan (performance) yang sedang atau tidak dilakukan
- 3) Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada
- 4) Memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan perbaikan.

Menurut Widodo (2016:94) strategi pengawasan sama dengan implementasi yaitu menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

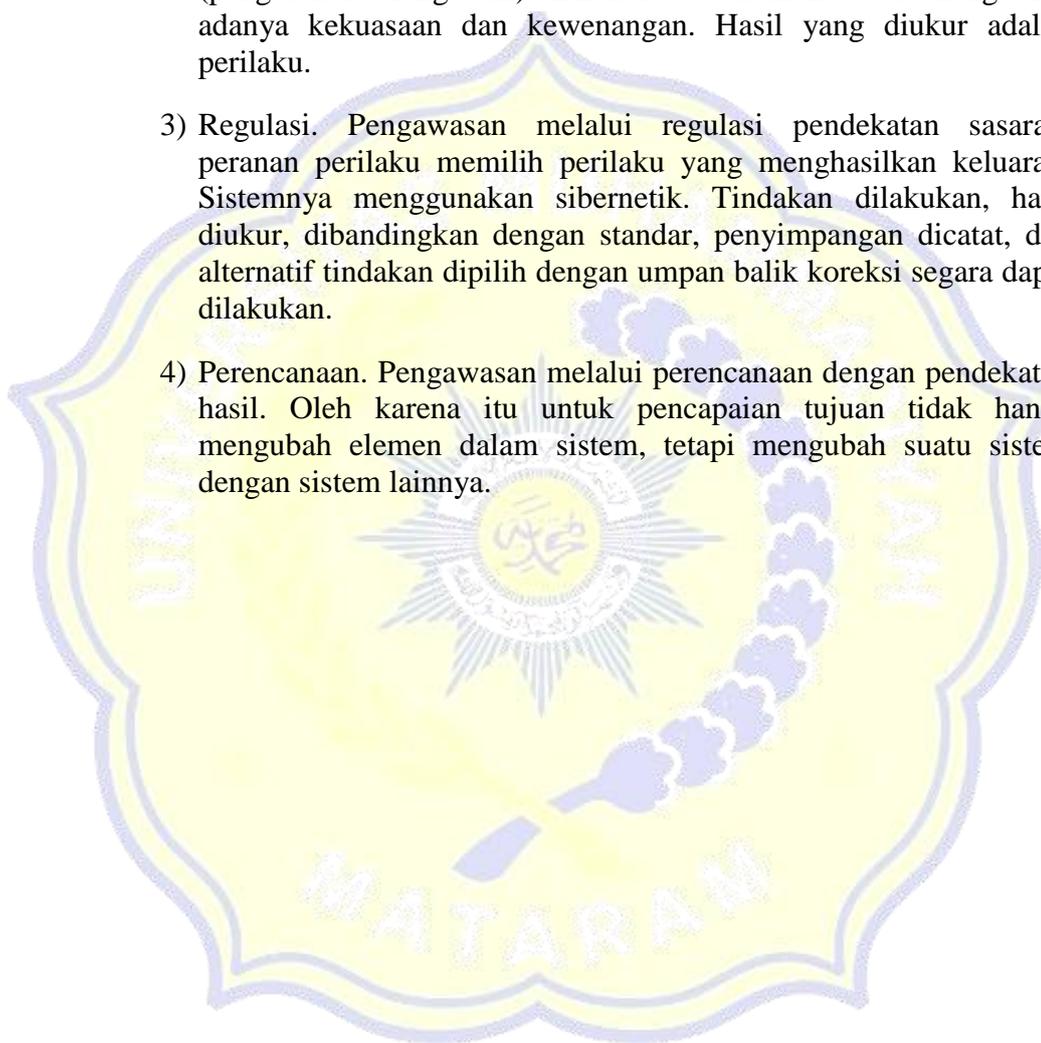
- 1) Pelaku Kontrol Pengawasan
- 2) Standar Operasional Kontrol
- 3) Sumber Daya Keuangan
- 4) Jadwal Pelaksanaan Kontrol

8. Gaya-gaya Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan setiap orang memiliki gaya yang berbeda-beda. Gaya pengawasan merupakan cara atau perilaku khas yang

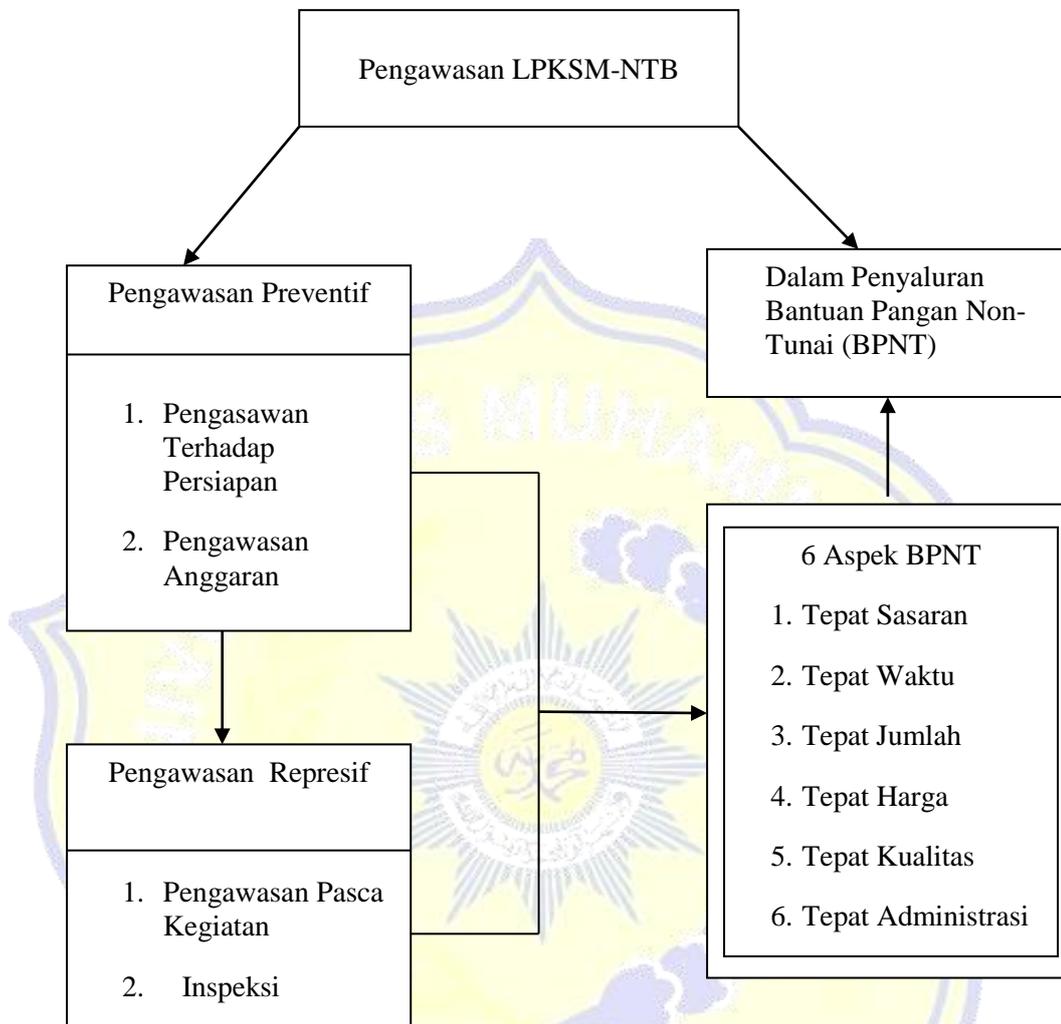
dilakukan pengawas pada saat melakukan fungsi pengawasan. Menurut Wibowo (2008:224) gaya pengawasan terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Ratunisasi. Pengawasan gaya ini sering dalam tindakannya dengan usaha pemberantasan perilaku. Alat yang digunakan yaitu tugas, peraturan, dan prosedur.
- 2) Direksi dan Surveillance. Perilaku diawasi dari luar dengan direksi (pengarahan orang lain). Direksi atau komando didukung oleh adanya kekuasaan dan kewenangan. Hasil yang diukur adalah perilaku.
- 3) Regulasi. Pengawasan melalui regulasi pendekatan sasaran, peranan perilaku memilih perilaku yang menghasilkan keluaran. Sistemnya menggunakan sibernetik. Tindakan dilakukan, hasil diukur, dibandingkan dengan standar, penyimpangan dicatat, dan alternatif tindakan dipilih dengan umpan balik koreksi segera dapat dilakukan.
- 4) Perencanaan. Pengawasan melalui perencanaan dengan pendekatan hasil. Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan tidak hanya mengubah elemen dalam sistem, tetapi mengubah suatu sistem dengan sistem lainnya.



C. Kerangka Berfikir

Gambar 1



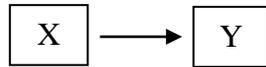
Sumber :Situmorang dan Juhir (1994:27)

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:58) Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Ada dua variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu variabel independent (variabel bebas) yang disimbolkan X, dan variabel dependent

(variabel terikat) yang disimbolkan Y. Adapun variabel X yaitu Pengawasan LPKSM-NTB serta variabel Y yaitu Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.



Keterangan :

X : Pengawasan LPKSM-NTB

Yang akan dikaji dalam penelitian ini yang berkaitan dengan variabel *independen* adalah pengawasan LPKSM meliputi:

- 1) Pengawasan Preventif
 - a) Pengawasan terhadap persiapan
 - b) Pengawasan anggaran
- 2) Pengawasan Represif
 - a) Pengawasan pasca kegiatan
 - b) Inspeksi

Y : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Yang akan dikaji dalam penelitian ini yang berkaitan dengan variabel *dependen* adalah penyaluran BPNT meliputi 6 aspek yaitu:

- 1) Tepat Sasaran
- 2) Tepat Jumlah
- 3) Tepat Harga
- 4) Tepat Waktu
- 5) Tepat Kualitas
- 6) Tepat Administrasi

E. Definisi Konseptual

1. Pengawasan merupakan segala aktivitas pengamatan yang dilakukan untuk menjamin apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan sebagai awal dalam langkah melakukan penilaian dan kemudian melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang menyimpang dari rencana semula.
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
3. Bantuan Sosial Non-Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong. e-Warong adalah agen bank pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya.
4. Indikator-Indikator Pengawasan
 1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

F. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014), definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Berikut tabel mengenai operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1
Definisi Operasional

NO	Variabel	Indikator
1	Pengawasan Preventif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap persiapan 2. Pengawasan anggaran
2	Pengawasan Represif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pasca kegiatan 2. Inspeksi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif merupakan gabungan dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2014:13) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2014:22) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengetahui informasi sebenarnya terhadap apa yang dikehendaki peneliti terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat-NTB (di Jl. Raya Terara

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat) studi kasus di Desa Labuhan Lombok.

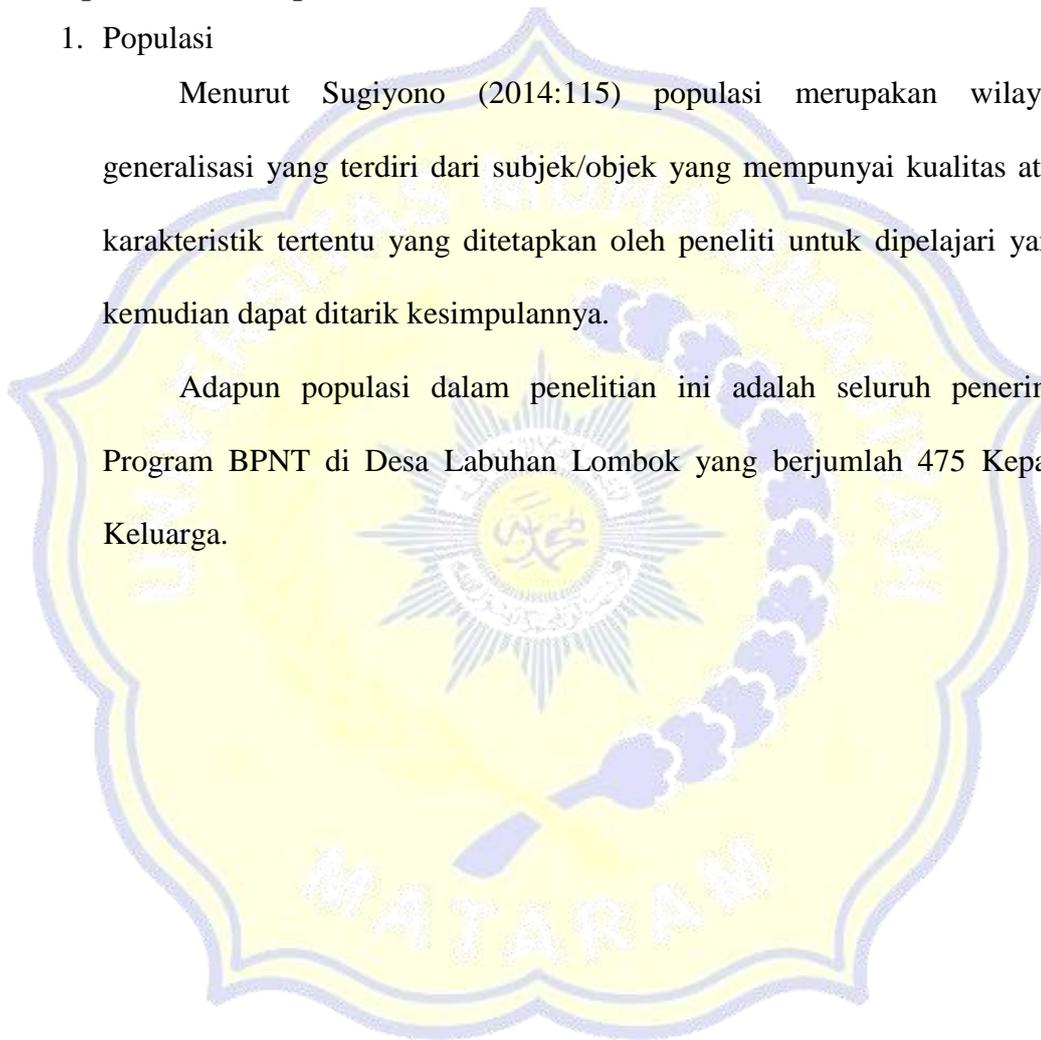
Adapun Waktu penelitian dimulai sejak bulan Desember 2021 sampai Januari 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:115) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerima Program BPNT di Desa Labuhan Lombok yang berjumlah 475 Kepala Keluarga.



Tabel 2
Data Penerima BPNT Desa Labuhan Lombok

No.	Nama Dusun	Jumlah Penerima BPNT
1.	Saleh Sungkar	57
2.	Batean	48
3.	Jati Makmur	53
4.	Jati Luhur	28
5.	Pererenan	37
6.	Sandubaya Timur	49
7.	Sandubaya Barat	43
8.	Kp. Banjar	36
9.	Kp. Turingan	42
10.	Kp. Baru	49
11.	Kayangan	31
	Jumlah	475

Sumber: Hasil rekap penerima BPNT Desa Labuhan Lombok, 2022

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:116) sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *stratified random sampling*. Menurut Yamane (1967) dalam Ulya (2018:109) menjelaskan bahwa stratified random sampling merupakan metode penarikan sampel dengan membagi populasi menjadi populasi yang lebih kecil membentuk strata berdasarkan kriteria tertentu, kemudian dari setiap sampel diambil sampel secara acak. Adapun sampel

yang ditentukan dalam penelitian ini dengan mengambil dusun dengan penerima BPNT paling banyak, dusun dengan penerima BPNT Sedang, dusun dengan penerima BPNT paling sedikit.

Tabel 3
Sampel Penelitian

NO	Dusun	Populasi Penerima BPNT	Sampel
1.	Saleh Sungkar	57 Orang	8 Orang
2.	Prerenan	37 Orang	8 Orang
3.	Jati Luhur	26 Orang	4 Orang
		120 Orang	20 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

D. Penentuan Responden dan informan

Informan adalah orang atau tokoh yang paling mengetahui dengan baik permasalahan yang akan diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi yang valid kepada peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, sumber data adalah orang yang dianggap paling memahami tentang apa yang kita ingin ketahui atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data seperti yang tersebut diatas, Sugiyono (2013:85).

Tabel 4
Imforman Penelitian

NO	Imforman	Jabatan	Jumlah
1	Lalu Putra Yadi	Sekretaris LPKSM	1 Orang
2	Andra Ashadi, SH.	Legal Konsultan	1 Orang
3	Rohman Rofiki	Aktivis	1 Orang
4	Samsul Hadi, S.IP	Aktivis	1 Orang
		Total	4 Orang

Sumber :Diolah Oleh Peneliti, 2022

Sedangkan responden dalam penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan *stratified random sampling* dengan membagi populasi kedalam strata. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 5
Responden Penelitian

NO	Dusun	Populasi Penerima BPNT	Sampel
1.	Saleh Sungkar	57 Orang	8 Orang
2.	Prerenan	37 Orang	8 Orang
3.	Jati Luhur	26 Orang	6 Orang
		120 Orang	20 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Bagong Suyanto dan sutinah (2005:55) mengatakan data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi, angket atau bersumber dari tangan pertama atau subjek

(informan) melalui proses wawancara. Data primer ini merupakan data yang sangat penting untuk kesuksesan penelitian ini.

Tabel 6
Unit Analisis Data Primer

NO	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Pengawasan Preventif	1. Pengawasan terhadap persiapan 2. Pengawasan anggaran	1. Bagaimana Pengawasan terhadap persiapan 2. Bagaimana pengawasan Anggaran BPNT	1. Sekretaris LPKSM 2. Legal Konsultan 3. Aktivis
2	Pengawasan Represif	1. Pengawasan pasca kegiatan 2. Inspeksi	1. Bagaimana Pengawasan Pasca Kegiatan 2. Bagaimana pengawasan di lapangan	1. Sekretaris LPKSM 2. Legal Konsultan 3. Aktivis

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

2. Data Sekunder

Bagong Suyanto dan sutinah (2005:56) mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua dan ketiga. Data sekunder dikenal sebagai data pendukung yang dapat digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data sekunder melalui media, buku, jurnal dan lain sebagainya yang mendukung hasil penelitian.

Tabel 7
Unit Analisis Data Sekunder

NO	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Pengawasan Preventif	1. Pengawasan terhadap persiapan 2. Pengawasan anggaran	1. Bagaimana Pengawasan terhadap persiapan	1. Sekretaris LPKSM 2. Legal Konsultan 3. Aktivistis
2	Pengawasan Represif	1. Pengawasan pasca kegiatan 2. Inspeksi	1. Data Temuan	1. Sekretaris LPKSM 2. Legal Konsultan 3. Aktivistis

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Kuesioner/Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan yang ditanyakan kepada respon dalam penelitian ini yaitu terkait dengan program BPNT. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket langsung tertutup dengan skala *likert*.

Skala *likert* merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei tentang pendapat seseorang. Dalam kuesioner ini

responden dapat memilih salah satu dari 5 *item* pilihan pertanyaan yang dikemukakan. Pembagian skor dimulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai angka 5 (sangat setuju).

Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Tabel Skala *Likert*

NO	Skala <i>Likert</i>	Singkatan	Skor
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Cukup	C	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Sugiyono (2014)

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan secara sistematis bukan observasi secara kebetulan. Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan sebenarnya tanpa usaha disengaja untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasinya, Nasution (2001:106).

Dalam penelitian ini, peneliti datang dan melihat langsung keadaan dilapangan yaitu di Kantor LPKSM-NTB. Dalam observasi ini peneliti dapat mencatat atau memperoleh data secara langsung. Hasil observasi diharapkan melengkapi data penelitian dan memperkuat keakuratan data penelitian.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang digunakan, Sugiyono (2013:317).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Metode wawancara digunakan sebagai sumber data primer atau sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari hasil laporan-laporan dan keterangan-keterangan tertulis, tergambar, terekam maupun tercetak yaitu struktur organisasi, gambaran umum, data-data tentang LPKSM-NTB, data penerima BPNT, Data Anggaran BPNT.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa aktivitas menganalisa data yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis kuesioner/angket digunakan analisis kuantitatif yaitu dengan tabel persentase baris.

Aktivitas lain dalam menganalisis data yaitu menggunakan teknik analisis model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015:91) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam menganalisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisa data:

1. Reduksi Data

Berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausa atau interaktif.

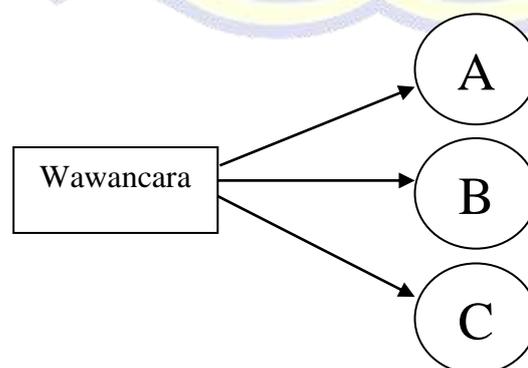
H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:83), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Gambar 2
Triangulasi Sumber



2. Triangulasi Teknik

Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Gambar 3
Triangulasi Teknik

